

Liem Tony Dwi Soelistyo
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Judul Buku : DASAR NEGARA: *Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia*
Penulis : Dr. Asmaeny Azis
Editor : Fajlurrahman Jurdi
Penerbit : RUAS Media
Tahun terbit : 2017
Tebal buku : xxviii + 164 Halaman
ASBI : 978-602-61576-2-1

Buku DASAR NEGARA: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia merupakan buah pemikiran dari Dr. Asmaeny Azis Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), beliau terbilang cukup produktif dalam menulis buku, terbukti hasil karya beliau sudah dipublikasikan di berbagai media massa terutama dalam karya buku. Dosen fakultas Hukum UMI dan Universitas Gorontalo ini juga didapuk sebagai Direktur Eksekutif Woman Legal Institute. Dr. Asmaeny Azis, beliau banyak menulis buku buku antara lain; Faminisme Profetik (2007), Gender Dalam Perspektif Sosial dan Budaya (2005), Perempuan di Persimpangan Parlemen (2011), Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (2013). Penulis juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar-seminar diskusi dan training tentang hukum, politik dan perempuan.

Buku ini ditulis oleh seorang politisi, mantan anggota DPRD kota Makassar yang memiliki reputasi yang cukup baik. Dr. Asmaeny Azis dianggap sebagai politisi yang bergerak tanpa pamrih, pernah menjabat posisi penting di sayap partai, kemudian vakum seketika. Meskipun namanya masih sebagai ketua salah satu sayap partai, ia tidak begitu aktif setelah meninggalnya anak kesayangannya, begitu kata Fajlurrahman Jurdi selaku sang editor buku ini, Sebagai seorang perempuan, Dr. Asmaeny Azis memiliki perhatian khusus pada isu isu politik perempuan. Terbukti, empat bukunya terdahulu berbicara mengenai politik perempuan, termasuk dinamika perempuan di parlemen. Pengalaman yang ia miliki semasa menjadi anggota DPRD membawa pribadi penulis kaya akan pengalaman praktis untuk dikombinasikan di dunia akademis.

Dalam buku ini penulis ingin menggambarkan dengan jelas kajian mengenai Dasar negara utamanya Pancasila ideologi kita sebagai ideologi politik dan juga Pancasila sebagai *volkgeist*, jiwa dan cita cita bangsa. Penulis menekankan bahwa Pancasila merupakan refeksi historis, sosiologis dan filosofis dari bangsa Indonesia. Sejarah hidup manusia Indonesia tertuang secara makro di dalam Pancasila. Manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, tak hidup tanpa agama dan keyakinan. Ruh yang menggerakkan manusia Indonesia adalah agama, sehingga bangsa ini meyakini agama sebagai spirit kehidupan bersama.

Pertama saya ingin membahas terlebih dahulu tentang penampilan buku ini, karena bila penampilan bukunya menarik tentu akan membuat pembaca ingin lebih mengetahui isi buku. Penampilan buku ini terbilang cukup sederhana dengan warna dasar abu abu dengan Judul buku "DASAR NEGARA" di bagian atas buku bercetak tebal, dilengkapi dengan foto presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang merupakan pencetus Pancasila itu sendiri, nah bagian yang yang membuat pembaca menjadi lebih penasaran adalah sub judul buku ini yang merupakan bahasan yang akan dibahas dari buku ini yaitu "Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia" cukup membuat pembaca penasaran dan timbul berbagai pertanyaan, apa itu Marhaenisme? Apa

itu Marxisme? Dan apa hubungannya dengan skema politik Indonesia disaat ini? Tentu ini adalah pertanyaan yang umum ketika pembaca pertama kali melihat buku ini. Buku ini cukup membahas secara detil apa itu dasar negara, terutama Pancasila kita dan makna-maknanya dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat ke dalam isi buku, halaman pertama dibuka dengan kata pengantar dari penulis Dr. Asmaeny Azis yang kemudian dilanjutkan oleh pengantar editorial dari Fajlurrahman Jurdi selaku editor cukup gamblang menjelaskan makna Pancasila sebagai *volkgeist* atau bisa diartikan sebagai jiwa bangsa. Sebagai simbol negara merdeka, Pancasila merupakan perekat, Pancasila dengan simbol burung Garuda dan Lima (5) sila-nya, memiliki daya magis yang kuat mengikat manusia Indonesia dengan daya ikat magis itu, maka persatuan sebagai perkakas utama negara multikultural, multi etnis, serta bahasa yang beragam dan tentu saja letak geografis yang berjarak cukup jauh satu sama lain. Selain menjelaskan makna kelima sila Pancasila, beliau juga memasukkan rumusan rumusan Pancasila dengan *Founding Fathers*nya sendiri seperti Pancasila Rumusan Muhammad Yamin, Rumusan Mr. Soepomo dan Rumusan sang Proklamator Ir. Soekarno hingga Piagam Jakarta sampai Pancasila kini yang kita ketahui. Penulis ingin mengingatkan kita lagi tentang pemikiran-pemikiran *Founding Fathers* terdahulu bahwa Pancasila merupakan gabungan dari berbagai gagasan gagasan yang kemudian disatukan ke dalam satu gagasan bukan langsung terjadi begitu saja. Saya menemukan kesalahan cetak mungkin di buku ini, mengapa Daftar Pustaka terdapat setelah pengantar di halaman xxv lalu juga terdapat daftar pustaka lagi di halaman bagian belakang buku. Meskipun tidak mempengaruhi isi buku terkait dengan yang ingin penulis sampaikan tentang pemahaman pembaca, namun hal tersebut tentu merupakan sebuah kecacatan dalam pandangan pembaca, bagaimana buku yang sudah masuk editorial bisa melewatkan kesalahan kecil seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi editorial lain untuk selalu memeriksa ulang buku sebelum benar-benar diterbitkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi buku.

Secara sistematis, buku ini terbagi atas empat bagian, yang akan saya singgung satu-persatu. Bagian Pertama, "Pancasila sebagai Genealogi Ideologi", penulis berbicara dengan lugas mengenai Pancasila sebagai suatu genus ideologi bangsa. Ideologi yang penulis maksud dalam buku ini bertautan dengan politik, atau beriringan dengan cita-cita politik bangsa Indonesia. Penulis membedah Pancasila beserta sejarahnya secara singkat untuk menemukan kembali apa itu Hakikat Pancasila untuk diaktivasi kembali dalam konteks politik kekinian. Penulis menjelaskan tentang genus atau genealogi konseptual mengenai politik Indonesia. Dimulai dari historisitas nilai-nilai dan konsep mengenai politik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan secara diametral dengan kenyataan politik yang terjadi saat ini. Oleh karena itu penulis memilah politik menjadi politik nilai (*political value*) dan politik sebagai tindakan (*political action*), menurutnya politik sebagai nilai berbasis pada konsep dan kebiasaan kebiasaan serta iman transendental masyarakat setempat. Politik sebagai nilai berbasis pada teori dan konsep, berakar pada pengetahuan dan tentu saja memiliki sejarah yang terikat dengan nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat. Sedangkan politik sebagai tindakan menurut penulis berprinsip pada realitas, pada kenyataan-kenyataan yang terjadi, ia lebih pragmatis, taktis dan berjangka pendek. Pada situasi tertentu diperlukan kemampuan menjalankan politik praktis ini secara cerdas dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Sehingga tampak bahwa politik sebagai tindakan adalah berhubungan dengan sikap jangka pendek. Penulis banyak memasukkan pendapat ahli dalam memperkuat pendapatnya, salah satunya pendapat/pandangan Thomas P. Jenkin dimana ia juga membedakan teori politik menjadi dua juga yaitu *pertama*, yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik, dan yang *kedua*, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai.

Saya rasa, cara penulis menggali kembali akar historis Pancasila ini dalam konteks ideologi politik bangsa sangat relevan dengan kondisi kekinian politik kita saat ini yang mulai retak oleh “benturan-benturan” kepentingan yang saling bertabrakan. Antar individu “mengangkat senjata”, “menghunus pedang politik”, “menimbang peluru kepentingan” dan “membunuh” lawannya tanpa rasa iba. Orang-orang ini sudah kehilangan fondasi moral kebangsaannya (moral nation), karena mereka meletakkan hasrat berkuasanya tanpa pijakan moral (moral value), sehingga mesin kepentingan melaju kencang tanpa rem yang mengakibatkan “tabrakan maut”. Pecahlah kohesi sosial menjadi kepingan-kepingan yang tak terurai, robohlah dinding kebersamaan dalam partikel-partikel yang saling bertolak belakang, hancur pula rasa persatuan yang telah didendangkan lebih dari setengah abad silam. Pancasila tidak lagi untuk digali akar historisnya, tidak lagi menjadi basis ideologi, tidak lagi mendapatkan tempat dalam ruang tindakan (action space) para elit politik. Orang-orang kemudian saling menghancurkan karakter melalui media. Demokrasi mengalami kemunduran nilai dan menjadi titik pijak tanpa pegangan ideologi. Suatu keliaran politik tanpa ideologi kata penulis dalam buku ini mengingatkan kita akan desakralisasi ideologi dalam dunia politik yang menyebabkan politik kian mengalami pragmatisme pada tingkatan yang paling nihilis yaitu titik nadir kehilangan perilaku yang makin “buas”. “Kebuasan” ini juga yang membawa ideologi politik Indonesia kehilangan pengaruhnya pada tindakan. Pancasila kehilangan makna politis dan nalar ideologis yang tidak pernah ketemu, justru nalar politis memenangkan seluruh pertarungan di tingkatan praktis, sementara nalar ideologis kehilangan basis artikulasinya, akibatnya politik menjadi liar.

Penulis merasakan betul retakan-retakan sosial itu, sehingga mengajak pembaca untuk kembali membuka sejarah Pancasila sebagai ideologi politik bangsa Indonesia. Bagian kedua pada buku ini “Ketegangan Ideologi dalam Politik”, penulis berpijak pada ketegangan ideologi dalam politik sebagai salah satu ancaman yang paling berbahaya bagi masa depan politik bangsa Indonesia. Penulis kembali mengajak kita pembaca untuk menelaah lagi apa itu ideologi, definisinya dan hubungannya dengan politik. Penjelasan yang gamblang dari penulis tentang ideologi secara umum mungkin bisa membantu pembaca, kaitanya dalam hal ini mahasiswa maupun akademisi dalam mempelajari apa itu ideologi sebenarnya. Dr. Asmaeny Azis dengan kapasitas intelektual yang baik, memperkenalkan kembali apa yang dikhawatirkan oleh ahli-ahli sebelumnya mengenai corak konflik ideologi dalam politik. Penulis mengantarkan kita untuk membuka ulang seteru panjang yang tak pernah berakhir antara kapitalisme dan sosialisme sebagai sebuah “konflik abadi”. Marxisme vs Kapitalisme yang diangkat oleh penulis memang menjadi daya tarik utama bagi pembaca saat pertama kali membaca buku ini, gambaran dari marxisme yang selama ini simpang siur di masyarakat dikupas tuntas dalam buku ini. Pendapat penulis bahwa kelahiran Marxisme adalah merupakan gerak dialektis untuk menolak Kapitalisme. Antara marxisme maupun kapitalisme baik sebagai ideologi maupun sebagai gerakan politik, tidak pernah bertemu secara konseptual. Meskipun dalam praktiknya hubungan kedua kutub ini seringkali tidak terhindarkan.

Ketegangan ini mulai muncul kembali ketika demokrasi mencapai titik puncak kejayaannya secara elektoral. Kita dapat menyaksikan bagaimana mengemukanya komunisme sebagai bahan diskursus belakangan ini. Gelegar “PKI Bangkit” serta menguat dan membangun kembali barisannya, demikian kira-kira secara umum desas-desus di media yang tidak henti belakangan ini. Kutukan menggema di seantero negeri, komunisme dianggap sebagai “setan yang bangkit dari neraka”, karena memiliki masa lalu yang kelam dengan sejarah politik masyarakat Indonesia. Sejak kehadiran Jokowi sebagai Presiden dan pencalonan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai calon Gubernur DKI, isu komunisme yang selalu hanya sebagai “isu gelandangan” karena tidak begitu mendapat tempat di hati sebagian masyarakat Indonesia. Namun kini, isu itu menguat dan menjadi bahas dasar

utama penguatan diskursus sentimen antar masyarakat Indonesia. Mereka yang semula tak begitu mengerti tiba-tiba mengepalkan tangan, meneriakkan pekikan dengan suara menggelegar dan siap berperang melawan “hantu” yang dianggap bangkit dari “neraka” itu.

Tetapi ada yang lebih penting dari pembahasan saya di bagian kedua buku ini, yakni pertanyaan lama, pertanyaan tua yang bahkan sudah uban oleh pergeseran waktu, yaitu pertentangan yang tajam antara Islam dan Marxisme maupun antara Islam dengan Kapitalisme? Pertanyaan ini tidak saja penting secara konseptual, tetapi juga mendesak secara politis dan mendasar secara ideologis. Pembaca akan digiring untuk menemukan jawaban-jawaban yang mengejutkan dari penulis Dr. Asmaeny mengenai hubungan yang “disetujui” dan “tidak disetujui” antara ketiganya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penulis sudah membagi bab khusus penjelasan secara jelas mengenai ketiga konsep tersebut. Lalu penulis juga memasukkan hubungan Pancasila dengan Islam yang selama ini masih hangat diperdebatkan dalam hal pendapat negara tidak bisa dipisahkan dari agama atau pendapat bahwa negara hendaknya “netral” terhadap agama. Pertentangan-pertentangan ini hendaknya tidak memisahkan sepenuhnya antara agama dan negara. Para pendiri negara masih percaya bahwa agama dan negara merupakan dua entitas yang saling menguatkan. Disini tidak akan saya jelaskan langsung jawabannya namun pembaca bisa melihat tulisan Dr. Asmaeny di dalam buku dan menemukan jawabannya. Intinya pada bab ini penulis kembali mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi politik bangsa Indonesia tidak lagi terjebak pada “kiri” atau “kanan”, komunis atau kapitalis, utara maupun selatan, tetapi sudah jelas bahwa Indonesia memiliki cita-cita politik dan ideologi bangsa sendiri, yang merupakan derivasi dari kutub-kutub ideologi dunia.

Bagian ketiga buku ini “Pancasila sebagai Ideologi bangsa”, penulis kembali menggali secara lebih seksama, detail dan komprehensif mengenai Pancasila yang bersumber dari Pidato Bung Karno. Penulis sekali lagi membuka historial kita mengenai lahirnya Pancasila yang dimulai dari perdebatan-perdebatan hingga akhirnya menjadi satu dalam Pidato Bung Karno (halaman 68). Pidato Bung Karno inilah yang menjadi hari lahirnya Pancasila, hingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.

Disini pula penulis membedah istilah-istilah yang digunakan di kampus, seperti Pancasila merupakan *Philosophische Grondslag*, yang disebut sebagai fundamental, dasar atau filsafat yang begitu dalam sebuah bangsa. Disaat semua orang berbicara mengenai neo-imperialisme, penjajahan dengan watak, cara atau karakter baru, yang menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan dan ancaman kedaulatan. Penulis dengan lugas menyingkap kembali konsep merdeka yang “dinyanyikan” berulang oleh para pendiri bangsa. Bagi pejuang dan pemikir seperti Bung Karno, Merdeka adalah “political independence”, *politieke onafhankelijkheid*. Merdeka bukan saja soal menarik diri dari “kerangkeng” si penjajah saja, dengan setia memaksa perbudakan, mengiris-iris kebebasan, membunuh hati nurani, dan bersikap seolah-olah sebagai pahlawan kesianghan bagi si terjajah. Tetapi juga sikap, pikiran dan tindakan kita terhadap “si penjajah” adalah hal yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan. Dengan meminjam kalimat dari Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa “Masyarakat bukan semata penjumlahan individu, tetapi sistem yang dibentuk oleh hubungan antar mereka yang mewakili realitas spesifik dengan karakteristik tersendiri”.

Penulis memastikan bahwa Pancasila yang digagas, dikonstruksi dan ditemukan oleh Bung Karno merupakan refleksi konseptual atas tindakan sampai dengan sikap masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pengambilan secara sengaja konsep Durkheim terutama mengenai dua pendekatan tentang solidaritas yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik mencerminkan kemampuan penulis membaca keadaan dan situasi politik yang dipadukan dengan refleksi akademisnya. Jelas bahwa cara berpikir penulis adalah perpaduan yang baik antara tindakan praktis dan refleksi kritis mengenai situasi terkini

bangsa Indonesia dengan berpijak pada Dasar Negara, Pancasila sebagai pijakan dalam kehidupan kolektif.

Bagian keempat dari buku ini membahas tentang “Keberpihakan Terhadap Kaum Marhaen”, penulis dalam buku ini berbicara dengan baik mengenai apa yang dimaksud dengan Marhaen? Saya termasuk yang baru mengetahui apa itu kaum Marhaen dari buku ini, penulis menjelaskan secara jelas tentang awal mula, apa itu kaum Marhaen sampai Marhaenisme. Konsep tentang Marhaen telah diuraikan penjang lebar oleh Bung Karno, dengan dalil yang cukup penting tentang eksistensi mereka dan landasan perjuangannya. Bung Karno meletakkan kaum ini sebagai kekuatan penting dari revolusi. Banyak yang menduga Marhaenisme yang diperjuangkan Bung Karno merupakan istilah lain dari Marxisme, mengingat kecenderungan perjuangan kaum Marhaen adalah sama dengan kecenderungan perjuangan kaum Marxis, namun itu terbantahkan dalam buku ini, dengan mengangkat hasil konferensi di Mataram tentang keputusan Partindo, Marhaenisme dan Marxisme (halaman 85).

Salah satu bahasan penting di bagian ini dan yang menarik perhatian saya adalah hubungan antara konsep Marhaen dengan Mustad’afin dalam Islam. Ini sangat penting mengingat banyak yang menuding Bung Karno, bahkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai salah satu yang memberikan perlindungan kepada PKI. Penulis menjelaskan gambaran kaum Marhaen dan hubungannya dengan Mustad’afin dalam Islam, yang membuat saya kagum bahkan penulis mengambil petikan-petikan ayat Al’Quran sebagai pendukung pendapatnya dalam mempresentasikan antara kaum Marhaen dengan kaum Mustad’afin dalam Islam (halaman 93-95). Penulis mengangkat tema tentang Pancasila dan perlindungan terhadap kaum Marhaen, yang historialnya dimulai dari Bung Karno yang masih terus menggunakan istilah Marhaen untuk menunjuk pada orang-orang miskin dan teraniaya sebagaimana yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Dan yang terakhir penulis dengan lugas memberikan gelar kepada Bung Karno sebagai sang Marhaenis karena perjuangan beliau bersama bangsa ini dalam melawan penjajahan.

Di akhir halaman buku ini penulis membeberkan lampiran LAHIRNYA PANCASILA yang merupakan *review* dari pidato pertama Pancasila yang diucapkan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Cukup tebal juga karena lampiran sebanyak ini (halaman 125-162), karena memang lampiran ini merupakan pidato lengkap yang penulis janjikan/perlukan dalam memperkuat pendapatnya supaya pembaca tidak bertanya-tanya seperti apakah pidato Lahirnya Pancasila tersebut.

Buku DASAR NEGARA; *Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia* ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana dasar negara itu saja, namun juga lebih terperinci lagi tentang makna dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa ini di masa mendatang. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tentulah membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini. Penulis dalam menggambarkan Pancasila tidak hanya dari definisinya saja, melainkan dari sejarah historial terbentuknya Pancasila oleh *Founding Fathers*, serta dari berbagai argumentasi dan gagasan yang diketengahkan, dan juga ragam ideologi diadu ketangguhannya dengan berbagai kompleksitas yang ada. Hingga lahirnya lima rumusan yang diberi nama Pancasila yang merupakan puncak dari kompromi filosofis dan politis pendirian Negara Indonesia. Penulis pantas mendapatkan apresiasi atas karyanya ini karena tidak hanya membahas konsep Pancasila sebagai nilai, namun juga memadukannya dengan realitas yang terjadi di masa kini, yang memang sudah banyak terjadi pergolakan yang tak pernah usai. Melalui buku ini penulis mengajak pembaca untuk bersama-sama kembali ke makna dan cita-cita luhur Pancasila seperti harapan para *Founding Fathers* terdahulu. Yakni harapan yang harus dapat direalisasikan pada saat ini, sampai dengan masa yang akan datang.